



**WORKING PAPER**

# **Dampak Dana Desa terhadap Kesejahteraan dan Ketimpangan**

---

**Disusun oleh:  
Tim Peneliti Article 33 Indonesia  
2018**

# **Dampak Dana Desa terhadap Kesejahteraan dan Ketimpangan: Preliminary Assessment**

Penulis:

Yusuf Faisal Martak

Sandy J. Maulana

Santoso

Juni 2018



## Daftar Isi

1. Latar belakang.....	6
2. Tinjauan pustaka.....	11
2.1 Latar belakang peraturan program Dana Desa.....	11
2.2 Perhitungan Dana Desa.....	12
2.3 Efektivitas Dana Desa melalui pembelajaran PNPM.....	13
2.4 Efektivitas dana desa berdasarkan Negara percontohan.....	15
3. Data dan Metode Penelitian.....	17
3.1 Sumber Data.....	17
3.2 Metodologi penelitian.....	19
3.3 Metode <i>difference – in – difference</i> .....	19
3.4 Deskripsi Sampel.....	22
3.5 Definisi operasional variabel dependen.....	22
3.6 Definisi operasional variabel independen.....	23
4. Hasil dan Pembahasan.....	25
4.1 Hasil Deskriptif.....	25
4.2 Hasil Estimasi Model DID Persamaan Tunggal.....	26
4.3 Hasil Analisis DID Persamaan Sistem.....	29
5. KESIMPULAN.....	31

## Daftar Tabel

Tabel 1. Tabulasi Silang Status Administratif dan Status Perkotaan-Perdesaan BPS .....	9
Tabel 2 Peraturan program Dana Desa.....	12
Tabel 3 Hasil Estimasi <i>Difference in Difference</i> pada tingkat kemiskinan absolut dan mobilitas ekonomi relatif (2013-2017) .....	27
Tabel 4 Hasil Estimasi <i>Difference in Difference</i> untuk Ketimpangan Intra-Desa (2013-2017).....	28
Tabel 5 Hasil Estimasi Persamaan Sistem Pengeluaran Per Kapita dan Jumlah Penduduk Miskin (2013-2017) .....	29
Tabel 6 Hasil Estimasi <i>Difference in Difference</i> pada tingkat kemiskinan absolut dan mobilitas ekonomi relatif (2013-2016) .....	36
Tabel 7 Hasil Estimasi <i>Difference in Difference</i> untuk Ketimpangan Intra-Desa (2013-2016).....	37
Tabel 8 Hasil Estimasi Persamaan Sistem Pengeluaran Per Kapita dan Jumlah Penduduk Miskin (2013-2017) .....	38

## Daftar Grafik

Gambar 1. <i>Growth Incidence Curve</i> (GIC) Pengeluaran Per Kapita, 2011-2012 (Kiri) dan 2016-2017 (Kanan).....	25
---	----

## 1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia sudah menunjukkan hasil yang masif dewasa ini. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang didorong perkembangan dalam kebijakan pemerintahan, pemanfaatan yang efektif dalam sumber daya alam, serta pertumbuhan angkatan kerja yang didominasi oleh angkatan muda (Elias & Noone, 2016). Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi tersebut karena hasil dari pertumbuhan kadang tidak terbagi secara merata, baik antar individu dan antar wilayah.

Hasil dari pertumbuhan yang tidak merata tersebut menghasilkan ketimpangan pendapatan yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2018, koefisien gini sebagai pengukur ketimpangan pendapatan masih dalam kondisi yang buruk. Tahun 2014, koefisien gini Indonesia menyentuh angka 0,406 dan hal tersebut meningkat hingga pada tahun 2016 mencapai angka 0,408. Meski pada tahun 2017 dan 2018 koefisien gini menunjukkan tren yang menurun, angka tersebut masih terbilang tinggi karena berada di atas 0,390. Hal ini menjelaskan bahwa perekonomian yang meningkat tidak serta-merta dapat menyelesaikan permasalahan perbedaan kondisi ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat.

Selain ketimpangan antar individu, ketimpangan antar wilayah juga perlu mendapat perhatian. Dari sisi porsi ekonomi, aktivitas ekonomi masih terpusat di wilayah Pulau Jawa. Di sisi lain, indikator kinerja pembangunan lain juga menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang cukup masif. Misalnya, dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didefinisikan sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dengan memperhitungkan kesehatan, pendidikan, dan penghidupan yang layak, maka terlihat bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah sangat tinggi. Pada tahun 2017, masih terdapat wilayah dengan nilai perbedaan IPM yang cukup besar, misal Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai IPM tertinggi mencapai angka 80,06, sedangkan Provinsi Papua memiliki nilai IPM terendah yaitu 59,09<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> BPS (2017)

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah di Indonesia adalah dengan mengadopsi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Sejak tahun 2001, Indonesia telah mengadopsi kerangka desentralisasi dalam sistem pemerintahan yang memberi pemerintah daerah wewenang, hak, dan sumber daya yang lebih besar untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan di setiap daerah. Hal ini dilakukan karena pemerintah daerah mengetahui tentang permasalahan, sumberdaya, dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya lebih dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dapat lebih aktif serta mandiri dibandingkan sebelumnya (Glasson, 1977).

Kunci desentralisasi fiskal adalah dengan memberikan keleluasan pemerintah daerah untuk mengatur anggaran serta memberikan berbagai transfer ke daerah baik yang bersifat *block grant* atau *specific grant*. Dengan meningkatkan diskresi pemerintah daerah atas keuangan daerahnya, diharapkan efisiensi pelayanan publik akan tercapai yang pada akhirnya berkaitan berujung pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di tiap wilayah.

Selain dari sisi teknokratik seperti alokasi anggaran, pemerintah juga memastikan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat juga mendapat perhatian. Pada tahun 2007, pemerintah membuat dua program besar yaitu Program Keluarga Harapan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan, kematian anak-anak dan bayi, serta memastikan seluruh masyarakat dapat menempuh Pendidikan dasar. Kedua program tersebut memiliki fokus yang berbeda yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau kota terutama Pulau Jawa, dan PNPM berfokus pada wilayah perdesaan. Dalam implementasinya, PNPM telah memberikan beberapa *outcome* seperti; (1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 12 target PNPM, (2) berdampak pada penurunan malnutrisi di jangka panjang, (3) PNPM memberikan pengaruh lebih besar di wilayah yang memiliki kesehatan dan pendidikan rendah.

Berdasarkan dua kebijakan yang diambil pemerintah pada periode sebelumnya, yaitu desentralisasi fiskal dan PNPM, pemerintah membentuk program 'perpanjangan tangan' PNPM yaitu Dana Desa. Dari sisi desentralisasi fiskal, Dana Desa dapat dianggap kelanjutan pelimpahan kewenangan keuangan pada tingkat administrasi pemerintahan otonom yang paling rendah. Dana Desa dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2015 berdasarkan Undang-undang No.6 tahun

2014. Selain itu, program tersebut merupakan ‘turunan’ yang dibuat oleh pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2005 (Handra, *et all*, 2017). Secara umum, tujuan Dana Desa adalah meningkatkan peran desa sebagai pendorong pembangunan beberapa sektor seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan tersebut sejalan dengan perubahan fungsi desa sebagai pemerintahan masyarakat yang berisi komunitas masyarakat dan pemerintah lokal dari yang sebelumnya hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Secara definisi, Dana Desa adalah penyaluran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah dan komunitas desa dengan tujuan meningkatkan pembangunan wilayah perdesaan seperti infrastruktur (irigasi, kondisi jalan, dan transportasi), pelayanan dasar (Pendidikan dan kesehatan), serta kemandirian masyarakat desa. Lebih dari itu, Dana Desa dapat membuat kondisi wilayah perdesaan lebih menarik sebagai tempat tinggal bagi masyarakat sebab pembaharuan pada bidang infrastruktur dan beberapa fasilitas yang berpengaruh pembangunan desa keseluruhan.

Dalam praktiknya, pemerintah pusat telah menyalurkan dana sebanyak Rp60 triliun kepada 74.954 desa pada tahun 2018, dengan rata-rata sebesar Rp800 miliar per-desanya. Angka tersebut terus meningkat yang pada tahun 2015 hanya berkisar antara Rp20 miliar hingga Rp22 miliar, dan kondisi tersebut sejalan dengan peningkatan jangkauan desa yang pada tahun 2015 hanya sebesar 74,754 (Kementerian Keuangan, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, evaluasi dampak atas pelaksanaan Dana Desa di tahun-tahun awal ini diperlukan. Evaluasi tersebut tidak bermaksud untuk memberikan penilaian apakah Dana Desa sebaiknya perlu diputuskan untuk dilanjutkan atau tidak. Pada dasarnya evaluasi dampak yang diperlukan untuk melihat bagaimana arah kebijakan Dana Desa yang telah dilakukan pemerintah sudah memberikan dampak pada pembangunan di desa secara khusus, Indonesia secara umumnya. Dengan mengetahui penilaian awal pada saat Dana Desa baru dilaksanakan, berbagai perbaikan dapat dilakukan dalam hal kebijakan dan pelaksanaan implementasi di lapangan.



Salah satu isu yang ada dalam analisis dampak Dana Desa pada khususnya, dan riset Dana Desa pada umumnya adalah bahwa Dana Desa dibagikan berdasarkan status administratif. Status administratif tersebut yaitu apakah suatu desa berstatus desa atau kelurahan. Akan tetapi, status tersebut kadang tidak sejalan dengan status desa sebagai daerah “Perdesaan” dalam kategori BPS yang lebih pada pendekatan fungsional atau karakteristik ekonominya. Pada Tabel 1 ditunjukkan bahwa terdapat sembilan persen wilayah yang diklasifikasikan secara administratif sebagai Desa namun merupakan daerah Perkotaan secara ciri ekonomi. Sebaliknya, terdapat sekitar dua persen daerah yang diklasifikasikan sebagai kelurahan, sehingga tidak memperoleh Dana Desa, namun karakteristik ekonominya masih merupakan perdesaan. Oleh karena itu, terdapat simpangan sebesar 10 persen dari tabulasi silang status administratif dan karakteristik ekonomi tersebut. Hal ini menyebabkan berbagai statistik yang menyebutkan hubungan kemiskinan di perdesaan dengan Dana Desa perlu diperhatikan secara khusus karena tidak semua daerah perdesaan merupakan Desa, begitu pula sebaliknya<sup>2</sup>. Akan tetapi, dalam penelitian ini fenomena ketidakcocokan status administratif dan karakteristik ekonomi akan digunakan sebagai strategi identifikasi untuk menginvestigasi dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan.

**Tabel 1. Tabulasi Silang Status Administratif dan Status Perkotaan-Perdesaan BPS**

	Perdesaan	Perkotaan	Total
<b>Desa</b>	81%	9%	90%
<b>Kelurahan</b>	2%	8%	10%
<b>Total</b>	83%	17%	100%

Sumber: PODES, 2011; diolah

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana dampak implementasi Dana Desa pada tiga tahun awal terhadap kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini menganalisis dampak Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan, kesenjangan dan kesejahteraan rumah tangga di wilayah desa. Teknik Evaluasi Dampak akan dipadukan dengan data SUSENAS dan PODES yang tersedia untuk melihat bagaimana Dana Desa berdampak.

<sup>2</sup> Misalnya klaim bahwa Dana Desa efektif atau tidak efektif pada artikel berikut:

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/19/134000026/kemiskinan-di-desa-masih-tinggi-efektivitas-dana-desa-dipertanyakan> dan <https://nasional.tempo.co/read/896689/angka-kemiskinan-di-desa-menurun/full&Paging=Otomatis>

Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut; (1) Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap kondisi kemiskinan di desa?, (2) bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kesejahteraan di desa?, (3) bagaimana pengaruh Dana Desa kepada tingkat ketimpangan antar dan di dalam desa? Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan Dana Desa dan bagaimana perbaikan yang akan dilakukan oleh pemerintah kedepannya.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Latar belakang peraturan program Dana Desa

Dana desa merupakan program implementasi pemerintahan Negara Indonesia dengan tujuan meningkatkan peran desa sebagai 'entitas' pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dasar dari program Dana Desa tertuang dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan komitmen politik dan konstitusional. Undang-undang tersebut memastikan perubahan paradigma dan sikap politik dari "desa lama" dan memulai "desa baru". Selama kurang lebih 15 tahun, Indonesia telah melaksanakan desentralisasi dari pusat ke pemerintah daerah, namun hal ini berkembang lebih jauh ke tingkat pemerintahan otonom terkecil dengan memberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya kepada jangkauan yang lebih besar yaitu desa.

Desentralisasi merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan lainnya. Hal ini bertujuan mengefektifkan pemanfaatan pendapatan, pengeluaran, dan layanan publik pemerintah daerah karena pemerintah tersebut lebih mengetahui permasalahan dan fokus daerahnya masing-masing (Sepulveda & Martinez-vazquez, 2011; Smoke, 2001). Terlebih, pemerintah daerah lebih memahami mengenai permintaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya lebih dari pemerintah pusat.

Seperti yang telah dijelaskan, saat ini Indonesia telah melakukan praktik desentralisasi fiskal ke wilayah perdesaan, dalam konstruksi "desa baru" terdapat pengakuan dan penghormatan negara kepada desa (asas rekognisi), negara memberikan mandat kewenangan dan pembangunan kepada desa, serta redistribusi sumberdaya negara kepada desa. Tabel 1 menunjukkan beberapa perbedaan antara 'desa lama' dengan 'desa baru' yang telah dibentuk dalam Undang-undang Desa (Eko, 2015). Salah satu hal yang mencolok dalam perbedaan kedua desa tersebut adalah kedudukan. Kedudukan desentralisasi fiskal di 'desa lama' membentuk pemerintah desa menjadi organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Dalam 'desa baru', kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, secara spesifik sebagai *self governing community* dan *local self government*.

**Tabel 2 Peraturan program Dana Desa**

	<b>Desa Lama</b>	<b>Desa Baru</b>
Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota ( <i>local state government</i> )	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antar <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i>
Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
<i>Delivery</i> kewenangan dan program	Target	Mandat
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

## 2.2 Perhitungan Dana Desa

Penyaluran Dana Desa telah dimulai pada tahun 2015 dengan anggaran 20,7 triliun rupiah dan rata-rata tiap desa mendapatkan dana sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, anggaran yang dikeluarkan untuk Dana Desa meningkat lebih besar dua kali lipat. Hal ini membuat anggaran Dana Desa mencapai angka Rp46,98 triliun dengan rata-rata tiap desa mendapatkan dana Rp628 juta. Peningkatan ini terjadi hingga tahun 2017 anggaran Dana Desa yang dialokasikan sebesar Rp60 triliun dengan tiap desa memiliki rata-rata sebesar Rp800 juta (Kementerian Keuangan dan Human BPJK, 2018). Namun pada tahun 2018 telah terjadi perubahan formulasi penganggaran Dana Desa, melalui pernyataan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Eko

Putro Sandjojo dalam diseminasi Dana Desa tahun 2017 (Tempo.co, 2017). Hal ini dilakukan karena keputusan pertimbangan penganggaran menitikberatkan pada perhitungan angka kemiskinan desa, dibanding formulasi sebelumnya yang lebih mengedepankan pemerataan anggaran.

Tahun 2018, besar anggaran Dana Desa yang dikeluarkan adalah Rp60.000 miliar kepada 74.958 desa, dengan ketentuan pembagian berdasarkan Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF). Alokasi dasar merupakan anggaran tetap bagi seluruh desa dan disalurkan secara merata, untuk tahun 2018 AD memiliki bobot sebesar 77persen atau setara dengan Rp46.200 miliar. Alokasi afirmasi adalah pembagian anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan golongan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan penentuan tersebut didapatkan dari data kementerian sosial, di tahun 2018 AD memiliki bobot sebesar 3persen. Terakhir adalah alokasi formula yang memiliki bobot sebesar 20 persen, dalam hal ini bobot AF ditentukan berdasarkan perhitungan;

- A. Jumlah penduduk dengan bobot 10 persen
- B. Jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 50 persen
- C. Luas wilayah desa dengan bobot 15persen, dan
- D. Indeks kemahalan konstruksi atau Indeks kesulitan geografis sebesar 25 persen

Alokasi formula dibentuk berdasarkan pertimbangan fokus pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan secara keseluruhan. Melalui formula tersebut, diharapkan dana yang dikeluarkan kepada desa dapat dengan efektif mengurangi kemiskinan setiap desa.

### 2.3 Efektivitas Dana Desa melalui Pembelajaran PNPM

‘Dana desa adalah ‘perpanjangan tangan’ PNPM yang telah dilaksanakan tahun 2007 hingga 2014. Pada tahun 2007, terdapat dua program besar yang dibentuk antara lain; (1) Program transfer tunai ke rumah tangga yang umumnya dikenal denganPKH, (2) Program pemberian dana ke masyarakat atau umum disebutPNPM. PNPM dibentuk berdasarkan prioritas pemerintah seiring dengan tujuan *Millenium Development Goals* yaitu menurunkan tingkat kemiskinan, kematian anak-anak dan bayi, dan memastikan terjangkaunya seluruh golongan

terhadap pendidikan dasar (Benjamin, Junko, & Susan, 2011). PKH dan PNPM Generasi memiliki jangkauan wilayah dan target yang berbeda, untuk PKH menjangkau ke kota di Pulau Jawa, sedangkan PKPM Generasi berfokus pada daerah perdesaan.

Pada tahun 2007, PNPM Generasi dapat menjangkau 1,605 desa di 129 *subdistricts*, jangkauan yang dilakukan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2009 PNPM Generasi dapat menjangkau 2000 desa di 164 *subdistricts* yang terbagi dalam lima fokus provinsi. Dalam masalah anggaran, PNPM Generasi menyalurkan dana hingga US\$20 juta pada tahun 2007 dan meningkat menyentuh angka US\$40 juta pada tahun 2009. Sebagai pendukung komunitas masyarakat desa, PNPM juga menyediakan asistensi dan pelatihan bagi masyarakat karena masyarakat desa sebagai perencana penggunaan anggaran diharapkan dapat mengimplementasikan dana seefektif mungkin sehingga 12 tujuan yang dibentuk seperti kegiatan imunisasi anak, gizi bayi, anak yang mengikuti sekolah dasar dan menengah pertama, dan lainnya dapat meningkat dan memiliki nilai yang positif setiap tahunnya. Untuk mengontrol kualitas dan efektivitas program-program yang dibentuk oleh masyarakat, pemerintah membuat besaran dana bantuan PNPM ditentukan berdasarkan performa dan produktivitas program dalam mencapai target-target yang telah ditentukan.

Dalam jangka praktik kurang lebih dua tahun, PNPM sudah memiliki dampak yang signifikan memberikan perubahan pada kondisi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis kualitatif pada 12 desa di dua provinsi tahun 2007 hingga 2009, PNPM generasi memberikan beberapa kontribusi seperti; (1) Berdampak positif dan signifikan terhadap 12 target yang tertera pada PNPM, (2) PNPM memiliki dampak jangka panjang dan berkontribusi terhadap penurunan malnutrisi, (3) dampak PNPM lebih terasa di daerah yang memiliki kesehatan dan pendidikan lebih rendah (Benjamin et al., 2011). Lebih dari itu, dampak positif lain dari PNPM terhadap masyarakat desa dalam bidang pendidikan adalah peningkatan pada partisipasi anak sekolah umur 7-12 tahun sebesar 0,8 persen, hal ini menjelaskan bahwa seluruh anak digolongkan umur tersebut dapat bersekolah dan menempuh pendidikan dasar yang dibutuhkannya. Selain itu, daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan peningkatan terbesar pada partisipasi pendidikan golongan umur 13-15 tahun disekolah menengah pertama.

## 2.4 Efektivitas Dana Desa berdasarkan Negara Percontohan

Dana Desa telah dilaksanakan di beberapa Negara di dunia tidak hanya di Indonesia. Salah satu Negara yang mengimplementasikan program sejenis Dana Desa adalah Thailand. Tahun 2001, pemerintah Thailand membentuk program yang bernama *Thailand Village and Urban Revolving Fund (TVF)*. Program ini bertujuan meningkatkan perekonomian 74.000 desa di Thailand dengan menerapkan aktivitas keuangan efektif dan kreatif yang berbeda dari sebelumnya melalui dana yang bantuan dari pemerintah. Menurut Haughton (2007), 'Dana Desa' yang diimplementasikan oleh pemerintah Thailand memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Dengan menggunakan metode *Propensity Score Matching (PSM)* dan *Difference in difference (DID)* serta data sekunder *Thailand Socioeconomic Survey* tahun 2002 dan 2004, diperoleh hasil bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif meningkatkan pada pendapatan, pengeluaran, dan *durable goods* dengan masing-masing peningkatan sebesar 1,9 persen, 3,3 persen, dan 5 persen pada kedua model.

Hasil analisis yang tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh Chandoevrit (2008), menggunakan model yang sama yaitu PSM dan DID. Program di Thailand tersebut dapat dimiliki oleh rumah tangga yang berada di desa bagian pusat dan selatan. Rumah tangga yang berada di bagian pusat Thailand mempunyai kesempatan lebih untuk mendapatkan dana jika mereka memiliki anggota rumah tangga lebih banyak berbeda dengan rumah tangga di selatan Thailand. Lebih dari itu, rumah tangga yang berada di bagian selatan Thailand memiliki beberapa faktor yang membuat mereka mendapatkan Dana Desa secara signifikan yaitu jumlah anggota rumah tangga yang berpendapatan, kepala rumah tangga yang telah menikah, dan umur kepala rumah tangga. Mengenai pembahasan dampak program Dana Desa, hanya rumah tangga yang berada di desa bagian pusat yang berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita sebesar 55 persen. Selain itu, Dana Desa masih memiliki pengaruh terhadap peningkatan pengeluaran non-konsumsi di desa bagian utara dan selatan. Dalam cakupan nasional, Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan nasional, diindikasikan hal ini terjadi karena dana yang tersalur ke rumah tangga tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan aktivitas perekonomian rumah tangganya. Dana Desa yang tersalur tidak memberikan kontribusi yang besar jika tidak didukung oleh manajemen risiko.

Selain Thailand, dana desa juga telah diterapkan oleh Negara Laos. Tujuan Negara Laos membentuk program *Sustainable Forestry and Rural Development Project* (SUFORD) atau umumnya dikatakan dana desa adalah mengedepankan *sustainable forestry development* dan mengurangi tingkat kemiskinan. Beberapa fokus tersebut dibentuk karena maraknya pemanfaatan hutan yang tidak bertanggung jawab, selain itu kondisi kesejahteraan masyarakat yang buruk akibat besarnya tingkat kemiskinan. Menggunakan hasil survey data kuantitatif kepada 76 desa dan 1,518 rumah tangga, Dana Desa di Laos memberikan dampak positif terhadap kondisi kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat desa meskipun masih tidak cukup besar. Terlebih, melalui analisis kualitatif, SUFORD menyumbangkan efek positif kepada komunitas masyarakat desa lebih tinggi dari yang diharapkan (Paavola, 2012). Dari sisi lain, kontribusi Dana Desa menemui beberapa tantangan seperti sulitnya dana tersebut menjangkau masyarakat secara keseluruhan, sulit untuk dikontrol karena diberikan kepada komunitas desa tanpa adanya asistensi, dan kurangnya evaluasi sehingga potensi Dana Desa belum dapat dimaksimalkan.



### 3. Data dan Metode Penelitian

#### 3.1 Sumber Data

##### *Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data Susenas tahun 2013 dan 2017 dan Potensi Desa tahun 2014. Data Susenas merupakan hasil dari kegiatan survey Badan Pusat Statistik. Dalam survey tersebut, pertanyaan yang diajukan mencakup bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, perumahan, serta konsumsi dan pengeluaran. Data Susenas sangat dibutuhkan bagi pemerintah dan perencana pembangunan karena dapat menggambarkan kondisi sosial dan demografi masyarakat secara nyata di sektoral maupun lintas sektor di Indonesia.

Susenas telah dilaksanakan sejak tahun 1963 oleh Badan Pusat Statistik dan terbagi dalam KOR (pokok) dan modul (rinci). Untuk Susenas modul terbagi menjadi tiga yaitu modul konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, modul sosial, budaya dan pendidikan, dan modul perumahan dan kesehatan.

Dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2010, Badan Pusat Statistik telah melakukan Susenas dengan rentang waktu pertahun, namun pada tahun 2011 terdapat perubahan dalam pengumpulan data Susenas yaitu secara triwulanan setiap tahunnya dimulai dari bulan Maret, Juni, September, dan Desember bagi Susenas KOR dan Susenas modul konsumsi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi data yang dihasilkan oleh Susenas, dan disesuaikan dengan permintaan data konsumsi pengeluaran dan rumah tangga untuk Produk Domestik Bruto triwulanan serta perhitungan kemiskinan.

Pada tahun 1963, cakupan wilayah kegiatan Susenas hanya sebesar 16.000 rumah tangga spesifik di Pulau Jawa. Selanjutnya terus meningkat pada tahun 1964, 1967, 1969, 1976, 1978, 1979, 1981, 1989 dan 1992 hingga menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Jumlah sample yang disurvei untuk KOR sebesar 202.500 rumah tangga pada tahun 1993, dan terus meningkat hingga mencapai 285.307 rumah tangga pada tahun 2011. Berbeda dengan sebelumnya, tahun 2012 jumlah sampel kor setiap triwulannya hanya sebanyak 75.000 rumah tangga.

##### *Pendataan Potensi Desa (Podes)*

Selain Susenas, penelitian ini juga menggunakan data Podestahun 2014. Podes adalah sebuah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia untuk mendapatkan informasi keberagaman wilayah, sosio ekonomi penduduk, infrastruktur, serta pembangunan di ruang lingkup yang lebih kecil yaitu desa/kelurahan hingga kabupaten/kota. Kegiatan pendataan potensi desa dilakukan setiap dua tahun menjelang sensus penduduk, sensus ekonomi dan sensus pertanian dalam rangka meningkatkan komprehensif data dari sensus-sensus tersebut.

Podes pertama kali diselenggarakan tahun 1980 sebagai rangkaian Sensus Penduduk pada periode tersebut. Selanjutnya pendataan Podes dilakukan tiga kali dalam kurun waktu 10 tahun sebagai rangkaian dari tiga sensus utama (Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi). Sejak 2008 pendataan potensi desa dilakukan secara terpisah dari rangkaian kegiatan sensus.

Pendataan potensi desa pada tahun 2014 dilakukan pada bulan April mencakup 73.709 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Responden pendataan adalah bagian administrasi pemerintahan setingkat desa, kelurahan dan UPT desa/kelurahan di setiap kecamatan dan kabupaten/kota. Pada pendataan Podestahun 2011 terdapat 77.126 wilayah desa, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan adanya proses pemekaran ataupun penggabungan wilayah. Adapun desa yang tercakup pada Pendataan Potensi 2014 harus memenuhi tiga syarat, yakni: (1) Memiliki wilayah dengan batas yang jelas, (2) Penduduk menetap di wilayah desa, (3) Ada pemerintahan desa.

Data yang disajikan dalam Podes antara lain sebagai berikut:

1. Podes/Kelurahan

Kondisi sosial ekonomi penduduk, ketersediaan infrastruktur, dan pembangunan desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

2. Potensi Kecamatan

Fasilitas perlindungan sosial, situs/bangunan bersejarah, obyek wisata, prasarana transportasi, serta aparaturnya kecamatan.

3. Potensi Kabupaten/Kota:

Keberadaan pertambangan, industri, perhubungan, politik dan keamanan,

serta aparaturn kabupaten /kota.

4. Kualitas Infrastruktur Pendidikan:

Keberadaan dan kualitas sekolah negeri termasuk jumlah siswa, guru, kondisi ruangan dan ansantasi yang ada di sekolah tersebut.

5. Kualitas Infrastruktur Kesehatan (Puskesmas/Pustu, Polindes, Posyandu):

Keberadaan dan kualitas fasilitas kesehatan termasuk: kondisi ruangan dan sanitasi yang ada di setiap fasilitas tersebut.

### 3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan dampak dari program Dana Desa yang telah dilakukan pemerintah pada tahun 2014 dan analisis statistika dengan menggunakan metode regresi *difference – in – difference*. Dengan menampilkan perbandingan kondisi desa pada tahun 2013 sebelum diadakannya program dengan tahun 2017 sesudah diadakannya program. Sesuai dengan tujuannya untuk mengevaluasi dampak dari program Dana Desa terhadap kondisi desa, penelitian ini menggunakan metode regresi *difference – in – difference* dengan dataset berbentuk data panel dua periode tahun 2013 dan 2017.

### 3.3 Metode Difference – in – Difference

Penelitian ini bertujuan menghitung evaluasi dampak dari suatu program yaitu Dana Desa, sehingga metode yang dipilih untuk digunakan adalah *differences-in-difference* (DID). Metode DID merupakan metode yang membandingkan perubahan *outcomes* sepanjang waktu antara sampel yang dijangkau oleh suatu program dengan yang tidak terjangkau sehingga dapat menjelaskan perbedaan yang diterima oleh kedua kelompok tersebut antar waktu (Baker, 2000). Berbeda dengan *first difference* yang hanya membandingkan suatu kelompok sampel diwaktu sebelum dan sesudah program dilaksanakan, DID juga turut membedakan kelompok sampel yang mendapat program (*treatment*) dan tidak (*comparison*), hal tersebut dilakukan agar memperkecil kemungkinan *bias* akibat faktor-faktor lain ditahun tersebut jika tidak dikelompokkan berdasarkan program.

Untuk membuat metode DID efektif, dibutuhkan penghitungan *outcome* yang diperoleh dari kelompok *treatment* dan kelompok *comparison*, dan keduanya dalam rentang sebelum dan sesudah program berlangsung. Hal ini menjadi penting karena penentuan dalam ukuran *outcome* diharapkan dapat mewakili perubahan yang dialami *treatment group* sehingga perbedaan antar kedua kelompok tersebut terukur dengan jelas.

Persamaan yang digunakan dalam metode DID adalah sebagai berikut

$Y_{st}$	$s = 1$	$s = 2$
$t = 1$	$Y_{11}$	$Y_{21}$
$t = 2$	$Y_{12}$	$Y_{22}$

$t = 1$  adalah tahun dimana program belum berjalan

$t = 2$  adalah tahun dimana program sudah berjalan

$s = 1$  adalah sampel belum mendapat *treatment*

$s = 2$  adalah sampel sudah mendapat *treatment*

$y$  = kombinasi hasil dari *dummy*  $t$  dan  $s$

Dengan model OLS persamaan metode DID dapat ditulis sebagai berikut:

$$y = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 \delta + \beta_3 (t \cdot \delta) + \varepsilon^1$$

Dimana  $t$  adalah *dummy* tahun,  $\delta$  adalah *dummy treatment* dan  $t \cdot \delta$  adalah *dummy* interaksi antara tahun dan *treatment* merepresentasikan tahun dimana sampel sudah mendapatkan *treatment* atau belum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode DID membandingkan perubahan *outcomes* antar sampel yang terjangkau program (mendapatkan *treatment*) atau tidak. Maka secara sederhana *dummy* variabel interaksi atau  $\beta_3$  dapat diformulasikan seperti di bawah ini.

$$\beta_3 = (y_{12} - y_{11}) - (y_{22} - y_{21})^1$$

$y_{11}$  adalah *outcomes* dari sampel pada tahun sebelum program berjalan dan tidak mendapatkan *treatment*

$y_{12}$  adalah *outcomes* dari sampel pada tahun sebelum program berjalan dan mendapatkan *treatment*

$y_{21}$  adalah *outcomes* dari sampel pada tahun program berjalan dan tidak mendapatkan *treatment*

$y_{22}$  adalah *outcomes* dari sampel pada tahun program berjalan dan mendapatkan *treatment*

Model regresi *difference – in – difference* yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta \text{Desa} + \gamma \text{Yr} + \delta(\text{Desa} * \text{Yr}) + \rho X + \varepsilon$$

$$Y1 = \alpha + \beta_1 \text{Desa} + \beta_2 \text{Yr} + \beta_3(\text{Desa} * \text{Yr}) + \beta_4 \text{pendapatan} \\ + \beta_5 \text{Gini} + \beta_6 \text{RLS} + \beta_7 \text{Listrik} + \varepsilon$$

$$Y2 = \alpha + \beta_1 \text{Desa} + \beta_2 \text{Yr} + \beta_3(\text{Desa} * \text{Yr}) + \beta_5 \text{Gini} + \beta_6 \text{RLS} + \beta_7 \text{Listrik} + \varepsilon$$

$$Y3 = \alpha + \beta_1 \text{Desa} + \beta_2 \text{Yr} + \beta_3(\text{Desa} * \text{Yr}) + \beta_4 \text{pendapatan} + \beta_6 \text{RLS} + \beta_7 \text{Listrik} + \varepsilon$$

Dimana  $Y$  adalah variabel dependen. *Desa* adalah *dummy* variabel desa mendapatkan *treatment* berupa Dana Desa atau tidak. Jika mendapatkan Dana Desa bernilai 1, jika tidak bernilai 0. *Yr* adalah variabel *dummy* tahun dimana program sudah dijalankan atau belum. Jika program sudah dijalankan maka bernilai 1, jika tidak bernilai 0. *Desa\*Yr* adalah variabel interaksi antara *dummy* tahun dan *dummy* kondisi desa. Interaksi ini menghasilkan beberapa nilai diantaranya, apabila desa menerima Dana Desa yang bernilai 1 pada kondisi tahun sebelum diadakannya program yang bernilai 0, maka bernilai 1. Apabila desa tidak menerima Dana Desa bernilai 0, pada tahun sebelum diadakannya program bernilai 0, maka bernilai 0. Apabila desa menerima Dana Desa bernilai 1, pada tahun program sudah berjalan bernilai 1, maka bernilai 1. Apabila desa tidak menerima Dana Desa bernilai 0, pada tahun program dijalankan bernilai 1, maka bernilai 1. Kondisi ini yang akan membedakan wilayah desa yang mendapatkan Dana Desa dan tidak. Sementara  $X$  adalah variabel independen lainnya.

Penelitian ini memiliki empat buah model dengan empat variabel dependen yang berbeda.  $Y_1$  adalah model dengan variabel dependen kondisi rumah tangga miskin, dan hampir miskin. Sesuai dengan tujuan Dana Desa untuk mengurangi kemiskinan.  $Y_2$  adalah model dengan variabel dependen pendapatan per kapita, sementara  $Y_3$  adalah model dengan variabel

dependen koefisien gini. Hal ini sesuai dengan tujuan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan.

### 3.4 Deskripsi Sampel

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Susenas tahun 2013 yang dikombinasikan dengan data Podes. Hal ini dikarenakan Susenas tidak memiliki informasi yang cukup mengenai identitas administratif desa. Selain itu, Susenas memberikan informasi mengenai wilayah *rural* dan *urban* akan tetapi tidak semua *rural* itu memiliki karakteristik desa yang diperlukan untuk penelitian dan tidak semua *urban* adalah kelurahan.

Sementara itu kekurangan data Podes adalah tidak tersedianya data tiap tahun, karena hanya dilakukan tiga kali setiap sepuluh tahun dan tidak tersedia variable *impact*, hanya berupa output saja. Untuk itu peneliti memilih untuk mengkombinasikan data Susenas dengan Podes.

Terdapat 78.609 sampel wilayah desa dan kelurahan dalam data Podes 2014. Wilayah tersebut terdiri dari 90% atau 70.390 sampel desa dan 10% atau 8.219 sampel kelurahan. Sampel terbagi ke dalam Kabupaten (*rural*) dan Kota (*urban*). Sebesar 81% atau 63.338 desa dan 2% atau 1.950 kelurahan merupakan bagian dari kabupaten. Sementara itu 9% atau 7.052 desa dan 8% atau 8.219 kelurahan merupakan bagian dari kota.

Dari sampel tersebut, dibentuk dua kelompok sampel yakni *control* dan *treatment*. Kelompok *control* adalah wilayah yang tidak mendapatkan Dana Desa pada tahun 2015 dan kelompok *treatment* adalah wilayah yang mendapatkan Dana Desa pada tahun 2015. Pada penelitian ini terdapat 406 kelompok *treatment* dan 139 kelompok *control*. Variabel tahun yang dipakai dalam penelitian adalah tahun 2013 saat program Dana Desa belum diadakan (*pre-program*) dan 2016 dimana program Dana Desa sudah diadakan (*post-program*).

### 3.5 Definisi Operasional Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan metode regresi *difference - in - difference* dengan empat variabel dependen yang berbeda yakni: (1) Kategori penduduk sangat miskin (2) Kategori penduduk hampir miskin (3) Pendapatan per kapita penduduk (4) Koefisien gini. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi dampak dari Dana Desa yang digadang-gadang dapat menurunkan kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan

kesejahteraan wilayah desa. Untuk itu peneliti menggunakan empat variabel dependen yang dapat mengevaluasi hal tersebut.

Untuk mengevaluasi Dana Desa dengan tujuan menurunkan kemiskinan, penelitian ini menggunakan variabel persentase penduduk miskin yang ditinjau dari garis kemiskinan BPS dan dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah penduduk hampir miskin dengan kriteria 20% di atas garis kemiskinan BPS dan penduduk sangat miskin dengan kriteria 80-100% di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipilih karena mampu mengukur miskin atau tidaknya penduduk dari indikator-indikator kemiskinan yang salah satunya adalah pengeluaran rumah tangga.

Variabel dependen lainnya adalah pengeluaran per kapita penduduk. Variabel pengeluaran per kapita merupakan rata-rata pengeluaran individu di suatu wilayah. Variabel ini adalah *proxy* untuk mengukur kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pengeluaran per kapita diindikasikan sampel memiliki kesejahteraan yang baik. Dengan demikian penelitian ini menggunakan variabel pengeluaran per kapita untuk mengevaluasi tujuan dari Dana Desa yakni meningkatkan kesejahteraan.

Variabel dependen yang terakhir adalah koefisien gini. Koefisien gini bernilai antara 0 sampai 1. Koefisien gini bernilai 1 artinya wilayah tersebut sangat tidakmerata/timpang, sebaliknya 0 menggambarkan pemerataan sempurna di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai koefisien gini, menggambarkan semakin timpangnya suatu wilayah. Koefisien gini yang digunakan pada penelitian ini adalah koefisien gini pendapatan yang menggambarkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Koefisien gini dipilih untuk mengevaluasi tujuan dana desa untuk mengurangi ketimpangan.

### 3.6 Definisi Operasional Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* desa yang terbagi dalam kelompok *control* dan *treatment*. Desa yang termasuk kelompok *treatment* bernilai 1 sementara kelompok *control* bernilai 0. Terdapat juga variabel *dummy* tahun yang digunakan yakni tahun 2013 yang merupakan tahun sebelum adanya program diberi nilai 0 dan tahun 2016 tahun dimana program telah berlangsung diberi nilai 1.

Lebih jauh lagi akan terdapat beberapa kombinasi nilai tertentu akibat dari interaksi *dummy* variabel tersebut. Wilayah desa yang menerima *treatment* bernilai 1, pada tahun sebelum diadakannya program yang bernilai 0, akan diinteraksikan sehingga menghasilkan nilai 1. Sementara wilayah desa yang tidak menerima *treatment* atau disebut juga sebagai kelompok *control* memiliki nilai 0, pada tahun program berjalan yang memiliki nilai 1, diinteraksikan sehingga bernilai 1. Dengan demikian, dari variabel-variabel tersebut beserta interaksinya dapat disajikan perbedaan kondisi wilayah pedesaan sebelum dan sesudah program berjalan.

Terdapat juga variabel independen pengeluaran per kapita penduduk sebagai *proxy* tingkat kesejahteraan penduduk dan koefisien gini pendapatan yang menggambarkan ketimpangan pendapatan. Kedua variabel ini dilibatkan tidak hanya sebagai variabel dependen untuk mengevaluasi tujuan dari Dana Desa, juga variabel independen sebagai variabel kontrol dalam mengevaluasi tujuan Dana Desa untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu variabel koefisien gini digunakan sebagai variabel independen untuk mengevaluasi dampak Dana Desa pada peningkatan kesejahteraan desa yang di-*proxy*-kan dengan pendapatan per kapita dan begitupun variabel pengeluaran perkapita digunakan sebagai variabel independen untuk mengevaluasi dampak dana desa dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Variabel independen lainnya yang berfungsi sebagai variabel kontrol antara lain adalah rata-rata lamanya sekolah dan persentase penduduk terhadap akses listrik. Variabel rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata lama individu di dalam suatu wilayah menempuh jenjang pendidikan. Dari data individu dikumpulkan dan dihitung secara agregat untuk menghasilkan nilai rata-rata tersebut.

Persentase rumah tangga pengguna listrik adalah jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan akses terhadap listrik dibandingkan dengan total pengguna listrik di wilayah tersebut. Variabel ini merepresentasikan seberapa besar penduduk yang sudah mendapatkan akses menggunakan listrik. Diasumsikan listrik adalah infrastruktur vital yang sangat dibutuhkan untuk menopang kegiatan ekonomi rumah tangga. Dengan akses menggunakan listrik maka rumah tangga dapat menjalankan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan yang berimplikasi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan rumah tangga.

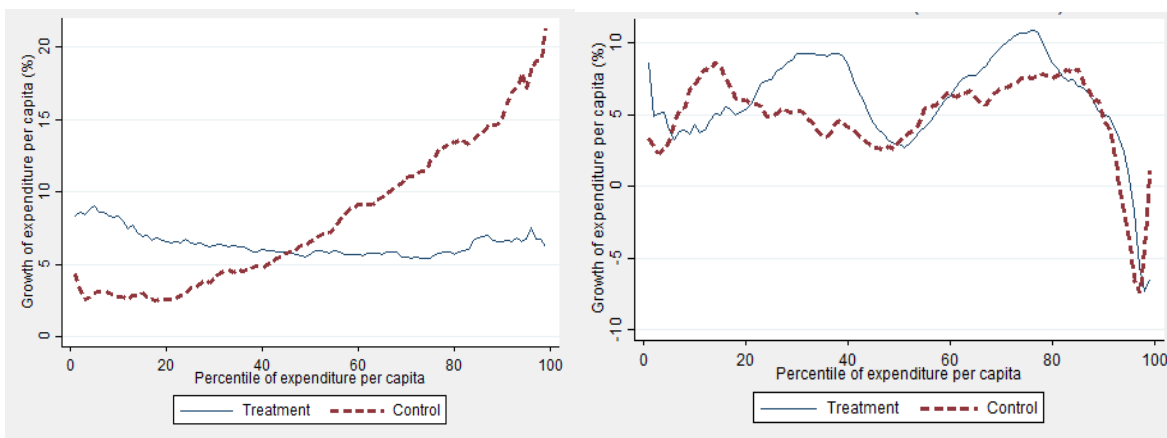


## 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tujuan penelitian yang dibahas pada bagian pendahuluan, bagian ini akan memaparkan beberapa hasil analisis yang terdiri dari: (1) analisis deskriptif pola pertumbuhan pengeluaran per kapita per persentil di daerah desa-perdesaan yang merupakan daerah treatment dan daerah kontrolnya; (2) analisis hasil regresi linear dengan teknik DID untuk variabel jumlah penduduk sangat miskin, jumlah penduduk persis di bawah garis kemiskinan, koefisien gini, dan pengeluaran per kapita; (3) analisis persamaan sistem untuk kemiskinan dan pengeluaran per kapita.

### 4.1 Hasil Deskriptif

**Gambar 1. Growth Incidence Curve (GIC) Pengeluaran Per Kapita, 2011-2012 (Kiri) dan 2016-2017 (Kanan)**



Sumber: Susenas, beberapa tahun; diolah

Analisis deskriptif penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Growth Incidence Curve* untuk melihat bagaimana pola pertumbuhan pengeluaran per kapita sebelum dan sesudah Dana Desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perubahan pola pertumbuhan pengeluaran per kapita yang cukup signifikan antara periode sebelum dan setelah 2014-2015 (periode Dana Desa disalurkan). Pada periode 2011-2012, pertumbuhan pengeluaran per kapita di daerah treatment (atau Desa-Perdesaan) cenderung merata baik dari penduduk paling miskin, menengah, hingga yang paling kaya. Sementara itu, pada periode setelah 2015, pertumbuhan di daerah treatment cenderung sangat bervariasi. Pertumbuhan tertinggi didominasi oleh masyarakat menengah

posisi pengeluaran per kapita persentil 20-40 persen dan 60-80 persen. Sementara itu, penduduk di bawah persentil 20 persen tumbuh sangat rendah, padahal di daerah kontrol penduduk di posisi yang sama menikmati pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Desa justru tidak berdampak pada penduduk yang paling membutuhkan bantuan, yaitu mereka yang berada di posisi termiskin (persentil 0-20 persen).

#### 4.2 Hasil Estimasi Model DID Persamaan Tunggal

Pada bagian ini akan dibahas hasil model empiris dengan regresi linear untuk beberapa variabel dependen. Variabel dependen pertama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang dibagi menjadi dua (di bawah 80 persen garis kemiskinan dan antara 80-100 persen garis kemiskinan) dan penduduk di kuintil 1 dan kuintil 2. Pada model dengan variabel dependen kuintil 1 dan kuintil 2, posisi relatif kesejahteraan penduduk terhadap seluruh masyarakat akan dianalisis. Hal ini berbeda dengan variabel dependen pertama (kemiskinan) yang menggunakan pendekatan berapa persen penduduk yang keluar dari bawah garis kemiskinan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan data tahun 2017, Dana Desa hanya berpengaruh kepada penduduk yang berada di 80-100 persen garis kemiskinan. Akan tetapi, Dana Desa tidak memiliki dampak terhadap penduduk yang berada di bawah 80 persen garis kemiskinan atau penduduk sangat miskin. Hasil tersebut cukup robust baik ketika variabel kontrol diperkenalkan maupun ditambahkan *fixed-effect*. Dalam hal ini, Dana Desa belum mampu mempunyai daya ungkit yang lebih jauh kepada mereka yang sangat miskin. Selain itu, dibandingkan tahun 2016 (Tabel X.X terlampir), Dana Desa berdampak lebih besar di tahun 2017.

Dalam hal persentase penduduk yang berada di kuintil 1 dan 2, Dana Desa belum mampu mengangkat penduduk di kuintil 1 dan 2 secara relatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Dana Desa belum mampu mengubah konfigurasi mobilitas ekonomi di desa. Oleh karena itu, meskipun Dana Desa sudah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di posisi mendekati garis kemiskinan (80-100 persen GK), namun belum mampu mengubah posisi mereka secara relatif. Salah satu alasan yang diduga adalah bahwa kelompok penduduk yang lain juga mengalami perbaikan kondisi ekonomi secara relatif.

**Tabel 3** Hasil Estimasi Difference in Difference pada tingkat kemiskinan absolut dan mobilitas ekonomi relatif (2013-2017)

Variabel	80-100% GK			<80% GK			Kuantil 1		Kuantil 2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TD*Dummy_2017	-1.890*** (0.634)	-1.897*** (0.527)	-2.112*** (0.498)	-1.386 (0.786)	-1.194 (0.648)	-0.918 (0.544)	-0.220 (0.362)	-0.293 (0.172)	-0.0338 (0.309)	-0.0975 (0.101)
TD (Treat-District)	2.877*** (0.450)	4.147*** (0.416)	3.182*** (0.445)	4.423*** (0.557)	5.030*** (0.512)	2.717*** (0.487)	-1.538*** (0.257)	-0.550*** (0.154)	-1.668*** (0.219)	-0.260*** (0.0908)
Dummy_2017	-2.298*** (0.316)	-2.289*** (0.266)	3.615*** (0.744)	-0.954** (0.392)	-1.146*** (0.327)	3.633*** (0.812)	0.197 (0.181)	0.564** (0.257)	0.0467 (0.154)	-0.659*** (0.151)
RLS-Pendidikan			1.442*** (0.157)			1.113*** (0.171)		0.568*** (0.0543)		0.243*** (0.0319)
Gini			3.503 (4.693)			17.44*** (5.127)		0.105 (1.625)		-2.828*** (0.956)
Elektifikasi-Infra			-14.77*** (1.592)			-17.58*** (1.740)		-3.465*** (0.551)		-2.272*** (0.324)
Pengeluaran Per.Kap			-3.594*** (0.432)			-2.948*** (0.472)		-0.179 (0.150)		0.489*** (0.0880)
Fixed-Effect	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes

Standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05

Catatan: RLS, Rata-rata Lama Sekolah; Elektrifikasi, persentase rumah tangga yang teraliri listrik

Hasil analisis model dengan variabel kuintil 1 dan 2 tersebut juga sejalan dengan hasil analisis dengan variabel koefisien gini. Analisis koefisien gini menunjukkan bahwa Dana Desa belum mampu menurunkan ketimpangan intra-desa. Hasil yang sama juga ditemukan di tahun 2016 (Tabel X.X terlampir). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh regresi dengan variabel pengeluaran per kapita yang menunjukkan bahwa Dana Desa berdampak terhadap peningkatan pengeluaran per kapita rata-rata di desa, relatif dibandingkan di daerah kontrol. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata Dana Desa telah mampu mengangkat sebagian penduduk di desa relatif terhadap wilayah yang lebih maju secara ekonomi. Dengan kata lain, terdapat dugaan bahwa Dana Desa mampu menurunkan ketimpangan antar wilayah, meski belum mampu menurunkan ketimpangan di dalam wilayah Desa secara signifikan.

**Tabel 4 Hasil Estimasi Difference in Difference untuk Ketimpangan Intra-Desa (2013-2017)**

Variabel	Koefisien Gini	Pengeluaran Per. Kap (1)	Pengeluaran Per. Kap (2)
TD*Dummy_2017	-6.93e-05 (0.00536)	-0.0463 (0.105)	0.426*** (0.1027)
TD (Treat-District)	0.0107*** (0.00405)	0.0570 (0.0745)	-0.177 (0.0919)
Dummy_2017	0.0160*** (0.00464)	1.686*** (0.0499)	0.491*** (0.050)
RLS-Pendidikan	0.00316*** (0.000826)		-0.377*** (0.0095)
Elektrifikasi-Infra	0.0674*** (0.00870)		3.585*** (0.9658)
Pengeluaran per. Kapita	-0.00294 (0.00235)		0.206 (0.328)
Fixed-Effect	Yes	No	Yes

Standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05

Catatan: RLS, Rata-rata Lama Sekolah; Elektrifikasi, persentase rumah tangga yang teraliri listrik

Hasil tersebut perlu mendapat perhatian pembuat kebijakan karena akan berdampak kurang baik secara jangka panjang terhadap hasil Dana Desa. Dalam jangka panjang, hasil pembangunan dari Dana Desa akan terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang bukan merupakan penduduk sangat miskin yang memerlukan perhatian. Naiknya pendapatan secara

rata-rata akibat Dana Desa yang tidak diikuti dengan turunnya jumlah penduduk yang sangat miskin mengindikasikan hal tersebut.

Terdapat perbedaan signifikan untuk hasil regresi DID dengan variabel dependen pengeluaran per kapita antara tahun 2017 dan tahun sebelumnya. Hasil regresi DID untuk tahun dampak Dana Desa tahun 2017 lebih besar daripada regresi di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa dampak Dana Desa terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 Dana Desa sudah berdampak signifikan terhadap pengeluaran per kapita, namun magnitude dampaknya masih kecil.

#### 4.3 Hasil Analisis DID Persamaan Sistem

**Tabel 5 Hasil Estimasi Persamaan Sistem Pengeluaran Per Kapita dan Jumlah Penduduk Miskin (2013-2017)**

VARIABLES	Pengeluaran Per. Kap	
	80-100% GK	<80% GK
TD*Dummy_2017	0.0687*** (0.0259)	0.4317*** (0.0873)
TD (Treat-District)	0.0018 (0.0233)	-0.199*** (0.0792)
Dummy_2017	0.4278*** (0.0130)	0.499*** (0.0434)
RLS-Pendidikan	-0.3413*** (0.0027)	-0.378*** (0.0081)
Gini	2.1795*** (0.256)	3.654*** (0.821)
Elektrifikasi-Infra	0.4122*** (0.087)	0.163 (0.2801)
	% penduduk di bawah GK	
	80-100% GK	<80% GK
Pengeluaran Per. Kap	-5.6558*** (0.335)	-0.231*** (0.059)
RLS-Pendidikan	-1.642*** (0.118)	-0.143* (0.078)
Elektrifikasi-Infra	-8.72*** (1.383)	-22.43*** (1.286)
Gini	23.11*** (3.002)	24.57*** (3.387)
Constant	17.041*** (1.275)	21.56*** (1.525)

---

Standard errors in parentheses

\*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$

Catatan: RLS, Rata-rata Lama Sekolah; Elektrifikasi, persentase rumah tangga yang teraliri listrik

Selain persamaan tunggal, kajian ini juga melakukan analisis dengan persamaan sistem. Analisis persamaan sistem bertujuan untuk melihat keterkaitan antar aspek hasil Dana Desa, yaitu bagaimana dampak kenaikan pengeluaran per kapita yang mengindikasikan aktivitas ekonomi berkaitan dengan pengurangan jumlah penduduk miskin di desa. Model persamaan sistem ini diestimasi secara simultan dengan pendekatan estimasi *Full Information Maximum Likelihood* (FIML).

Hasil analisis persamaan simultan menunjukkan bahwa selain variabel treatment, rasio elektrifikasi dan Koefisien Gini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengeluaran perkapita dan jumlah penduduk yang termasuk 80-100 persen GK. Hasil variabel treatment Dana Desa yang signifikan menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan untuk kedua golongan (80-100 persen GK dan golongan sangat miskin) melalui jalur peningkatan aktivitas perekonomian di desa. Hasil ini berbeda dengan hasil persamaan tunggal yang mana Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di golongan sangat miskin.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

### 5.1. Kesimpulan

Dana Desa merupakan salah satu program yang ditujukan untuk mengatasi masalah pembangunan yang belum tuntas, antara lain kemiskinan dan ketimpangan. Dengan premis bahwa level pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat lebih mengerti kebutuhan pelayanan publik khas di daerahnya, maka Dana Desa yang akan diadministrasi secara otonom oleh pemerintah desa diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan tersebut.

Program Dana Desa yang merupakan turunan langsung dari diimplementasikan Undang-undang Desa yang telah dirumuskan dari administrasi pemerintah sebelumnya, diteruskan oleh administrasi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program ini merupakan janji politik dalam rangka mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah desa. Komitmen pemerintah tersebut ditunjukkan dengan semakin meningkatnya alokasi Dana Desa secara nominal dalam APBN.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sudah terdapat beberapa hasil dampak Dana Desa pada beberapa aspek. Dana desa memang secara langsung belum berhasil mengurangi kemiskinan yang parah di desa dan juga ketimpangan intra-desa. Akan tetapi, dampak Dana Desa sudah terlihat dari sisi peningkatan kesejahteraan untuk beberapa kelompok masyarakat di desa. Aktivitas perekonomian di desa mulai bergeliat yang diindikasikan dengan naiknya rata-rata pengeluaran per kapita di desa.

Dampak ini diduga sebagai konsekuensi bagaimana Dana Desa digunakan oleh mayoritas pemerintah desa di tahun-tahun awal. Pemerintah desa lebih banyak mengalokasikan Dana Desa untuk program-program infrastruktur dasar yang mana memang sangat dibutuhkan bagi kelancaran aktivitas ekonomi di desa, misalnya jalan desa. Penggunaan tersebut memiliki dampak baik dari sisi positif dan negatif. Secara positif, penggunaan untuk membangun infrastruktur ini membuat desa siap dari sisi infrastruktur dasar yang nantinya akan membuat roda perekonomian desa bergerak, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan. Akan tetapi, pada tahun-tahun awal terlihat bahwa Dana Desa belum memiliki daya ungkit terhadap penduduk yang berada di posisi sangat miskin.

Tidak berdampaknya Dana Desa secara langsung terhadap penduduk yang paling miskin terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya penduduk yang sangat miskin tidak memiliki instrumen atau kapabilitas untuk mengakses kesempatan atau fasilitas yang terbangun dari Dana Desa. Misalnya, dengan adanya jalan desa diharapkan dapat digunakan untuk memperlancar arus barang untuk produk pertanian serta terbangunnya infrastruktur irigasi. Akan tetapi penduduk sangat miskin ini tidak memiliki faktor produksi yang langsung bisa dimanfaatkan dengan adanya fasilitas tersebut, misalnya lahan pertanian milik sendiri atau kendaraan untuk mengangkut hasil pertanian.

Selain itu, hasil analisis empiris juga menunjukkan bahwa Dana Desa belum mampu menurunkan ketimpangan intra-desa dan juga meningkatkan mobilitas ekonomi di Desa. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil Dana Desa masih belum dinikmati secara merata oleh semua penduduk di berbagai golongan pendapatan. Terdapat dugaan bahwa hasil dari Dana Desa masih paling banyak dinikmati oleh penduduk yang berada di atas 80% garis kemiskinan. Meskipun berdampak, namun secara relatif Dana Desa belum mampu mempengaruhi posisi kesejahteraan secara relatif masyarakat di desa.

Dari sisi magnitude, dampak Dana Desa ke beberapa variabel yang signifikan menunjukkan hasil yang lebih besar di tahun 2017 dibanding tahun sebelumnya. Misalnya, dampak Dana Desa terhadap peningkatan pengeluaran per kapita lebih besar di tahun 2017 dibandingkan 2016. Diharapkan di tahun-tahun setelahnya Dana Desa juga mampu memperluas dampaknya ke aspek lain, termasuk ketimpangan dan penurunan kemiskinan parah.

## 5.2. Rekomendasi

Dari hasil temuan penelitian ini dapat direkomendasi beberapa hal untuk perbaikan kebijakan program dana desa ke depan.

Peruntukan dana desa perlu difokuskan pada hal-hal yang langsung bersentuhan dengan dorongan untuk mengangkat mereka yang sangat miskin di desa. Program program infrastruktur yang saat ini masih menjadi salah satu prioritas penggunaan desa perlu dipikirkan agar apa yang dibangun dapat dimanfaatkan mereka yang sangat miskin. Oleh karena itu, pelibatan mereka yang sangat miskin ini dalam perencanaan dana desa menjadi sangat penting.



Program padat karya tunai di desa (PKTD) dapat menjadi salah satu solusi untuk melibatkan mereka yang sangat miskin dalam memperoleh tambahan pendapatan. Program ini mensyaratkan pesertanya adalah mereka yang pengangguran, miskin, dan mempunyai anak stunting. Apakah program ini cukup berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang miskin, minimal dalam jangka pendek, masih perlu diteliti mengingat pelaksanaannya yang masih baru. Namun ini merupakan program yang perlu didukung dan terus diperbaiki ke depan.

Program-program lain yang berpotensi untuk mengungkit tingkat ekonomi masyarakat miskin di desa perlu terus didorong dan diperbaiki. Salah satunya pengembangan kelembagaan ekonomi seperti badan usaha milik desa (BUMDes). Saat ini telah banyak BUMDes yang telah berdiri, namun mungkin masih perlu ditingkatkan kapasitasnya baik secara organisasi, keuangan, maupun bisnis. Peran pemerintah dan Lembaga non pemerintah untuk meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes sangat diperlukan. Penting untuk memastikan bahwa dalam proses pengembangan ini, prioritas utama adalah mereka yang sangat miskin di desa.

Selebihnya penelitian ini mencoba melengkapi kekurangan data yang tersedia baik yang bersumber dari Susenas maupun Podes. Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan data yang lebih akurat mengenai perkembangan desa, sehingga dapat dilakukan evaluasi menggunakan informasi terbaru, lebih spesifik pada Susenas dan Podes tahun 2018 karena telah terjadi perubahan formulasi Dana Desa tahun 2018 oleh Kementerian Keuangan dengan lebih memfokuskan penyaluran dana desa pada wilayah desa yang lebih miskin. Sementara itu program Dana Desa merupakan inovasi kebijakan yang masih dapat berkembang, sejalan dengan fokus pemerintah era Jokowi yaitu menyisipkan masalah ketimpangan dan menjamin kesejahteraan dapat dicapai seluruh golongan.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2018). GDP Growth of Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.
- Baker, J. (2000). *Evaluating the Impact of Development Projects on Poverty: A Handbook for Practitioners*.
- Benjamin, A. O., Junko, O., & Susan, W. (2011). Indonesia's PNPM Generasi Program: Final Impact Evaluation Report, (June).
- Chandoevrit, W. (2008). The Impact of the Village Fund on Rural Households. *TDRI Quarterly Review*, (June), 9–16.
- Eko, S. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi*.
- Elias, S., & Noone, C. (2016). The Growth and Development of the Indonesian Economy, 33–44.
- Glasson, J. (1977). *Book of Introduction of Regional Planning*.
- Handra, H *et al* (2017). Village Fund and Poverty Alleviation, (February), 1–16.
- Haughton, J. (2007). Does the Village Fund Matter in Thailand ? National Statistics Office of Thailand.
- Kementerian Keuangan dan Human BPK. (2018). *Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018*.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Paavola, M. (2012). *The Impact of Village Development Funds on Community Welfare in the Lao People's Democratic Republic*.
- Sepulveda, C. F., & Martinez-vazquez, J. (2011). The consequences of fiscal decentralization on poverty and income equality. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 29, 321–343. <https://doi.org/10.1068/c1033r>

Smoke, P. (2001). Fiscal Desentralisation in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Practice. *United Nations Research Insitute for Social Development, Geneva.*

Tempo.co. (2017). Fokus Entas Kemiskinan, Formulasi Distribusi Dana Desa Diubah

**Tabel 6 Hasil Estimasi Difference in Difference pada tingkat kemiskinan absolut dan mobilitas ekonomi relatif (2013-2016)**

	80-100% GK		Sangat Miskin (<80% GK)			Pengeluaran Per Kap.		
	1	2	3	4	5	6	7	8
TD*Dummy_2016	-0.101*** (0.007)	-0.029*** (0.007)	-0.01 (0.007)	-0.042*** (0.009)	-0.005 (0.006)	-0.003 (0.005)	0.096*** (0.031)	0.047** (0.020)
TD (Treat-District)	0.116*** (0.004)	0.174*** (0.044)	0.04 (0.049)	0.085*** (0.006)	-0.127 (0.081)	-0.175** (0.069)	-0.417*** (0.025)	-0.630*** (0.075)
Dummy_2016	0.065*** (0.0030)	-0.006 (0.005)	0.058*** (0.015)	0.038*** (0.003)	0.002 (0.004)	0.079*** (0.011)	0.384*** (0.026)	0.413*** (0.018)
PengeluaranPer Kap.			-0.151*** (0.036)			-0.186*** (0.025)		
RLS-Pendidikan			0.006*** (0.002)			-0.001 (0.001)		0.006 (0.005)
Elektrifikasi-Infra			0.005 (0.0570)			0.02 (0.027)		-0.006 (0.057)
Gini			0.101 (0.130)			0.551*** (0.084)		1.533*** (0.189)
Fixed-Effect	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes

Standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05

Catatan: RLS, Rata-rata Lama Sekolah; Elektrifikasi, persentase rumah tangga yang teraliri listrik

**Tabel 7 Hasil Estimasi Difference in Difference untuk Ketimpangan Intra-Desa (2013-2016)**

	Gini	
	1	2
TD*Dummy_2016	0.0100 (0.007)	0.0003 (0.006)
TD (Treat-District)	-0.0434*** (0.006)	-0.1007*** (0.037)
Dummy_2016	-0.0095 (0.007)	-0.0604*** (0.010)
RLS-Pendidikan	-0.0014 (0.001)	-0.0032** (0.002)
Elektrifikasi-Infra	-0.0114 (0.014)	0.004 (0.018)
Pengeluaranper kapita	0.0415*** (0.007)	0.1567*** (0.019)
Fixed-Effect	Yes	No

Standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05

Catatan: RLS, Rata-rata Lama Sekolah; Elektrifikasi, persentase rumah tangga yang teraliri listrik

**Tabel 8 Hasil Estimasi Persamaan Sistem Pengeluaran Per Kapita dan Jumlah Penduduk Miskin (2013-2017)**

	Pengeluaran Per Kap.	
	1	2
TD*Dummy_2016	0.087** (0.034)	0.114*** (0.033)
TD (Treat-District)	-0.317*** (0.029)	-0.304*** (0.029)
Dummy_2016	0.422*** (0.028)	0.414*** (0.028)
RLS-Pendidikan	0.035*** (0.007)	0.039*** -0.007
Elektrifikasi-Infra	0.055 -0.073	0.057 -0.073
Gini	0.884*** -0.187	0.942*** -0.189
	Hampir Miskin	Sangat Miskin
Pengeluaran Per Kapita	-0.060*** -0.008	-0.053*** -0.01
RLS-Pendidikan	-0.002** -0.001	-0.005*** -0.001
Elektrifikasi-Infra	0.011 -0.047	-0.138*** -0.045
Gini	-0.005 -0.048	0.218*** -0.054

Standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05

Catatan: RLS, Rata-rata Lama Sekolah; Elektrifikasi, persentase rumah tangga yang teraliri listrik